EVALUASI PERAN PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN KUALITAS LINGKUNGAN MASYARAKAT PADA LAHAN GAMBUT DI KECAMATAN DUSUN SELATAN

(Evaluation of the Role of Social Forestry in Improving Economic Well-being and Environmental Quality among Communities in Peatland Areas of Dusun Selatan Subdistrict)

Minoria Sirait[1)], Tri Prajawahyudo[1)], Alpian[1)], Abdul Mukti[1)], Adi Jaya[1)], dan Yosefin Ari Silvianingsih[1)]

1) Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Palangka Raya, Jl. Hendrik Timang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Kontak person: minoria@gmail.com

ABSTRACT

Legal access to manage forest areas is granted to local communities through social forestry; however, quantitative evidence of its contribution to economic well-being and environmental quality in peatland ecosystems remains limited. In this study, the implementation and main challenges of social forestry were described, and its effects on the economic well-being and environmental quality of peatland communities in Dusun Selatan Subdistrict, South Barito Regency, were analyzed. A quantitative survey supported by descriptive qualitative data was conducted in three social forestry areas from 1 December 2025 to 28 February 2026. Data were collected from 63 respondents, selected by purposive sampling, using a 26-item five-point Likert questionnaire and were analyzed by simple linear regression. The instrument was valid and reliable (Cronbach's alpha 0.950 to 0.963). The implemented programs included resort-based forest management facilitation, forest protection, non-timber forest product utilization, and environmental services. The highest item means per variable were recorded for organizational structure (3.62), non-timber forest product development (3.56), and reduced peat fires (3.78), whereas the lowest were recorded for training (3.29), family income improvement (3.10), and conservation involvement (3.17). Social forestry significantly affected economic well-being ($B = 0.877$; $\beta = 0.816$; $R^2 = 0.666$; $p < 0.001$) and environmental quality ($B = 0.769$; $\beta = 0.814$; $R^2 = 0.663$; $p < 0.001$), with nearly equal magnitudes. High community dependence on natural resources and the vulnerability of peat swamp forests to damage and fire were the main challenges. Strengthening training, product innovation, and rehabilitation is recommended.

Keywords: economic well-being; environmental quality; peatland; simple linear regression; social forestry

ABSTRAK

Akses legal untuk mengelola kawasan hutan diberikan kepada masyarakat melalui perhutanan sosial, tetapi bukti kuantitatif mengenai kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi dan kualitas lingkungan pada ekosistem gambut masih terbatas. Pada penelitian ini, pelaksanaan dan tantangan perhutanan sosial dideskripsikan, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi dan kualitas lingkungan masyarakat lahan gambut di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, dianalisis. Survei kuantitatif yang didukung data kualitatif deskriptif dilaksanakan di tiga areal perhutanan sosial pada 1 Desember 2025 sampai 28 Februari 2026. Data dikumpulkan dari 63 responden yang ditetapkan secara *purposive* menggunakan kuesioner skala Likert 26 butir, kemudian dianalisis dengan regresi linear sederhana. Seluruh butir dinyatakan valid dan instrumen dinyatakan reliabel (Cronbach's alpha 0,950 sampai 0,963). Program yang terlaksana mencakup fasilitasi pengelolaan kawasan hutan berbasis resort, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan. Rerata butir tertinggi pada tiap variabel dicatat untuk struktur organisasi kelompok (3,62), pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu (3,56), dan penurunan kebakaran lahan (3,78), sedangkan rerata terendah dicatat untuk pelatihan (3,29), peningkatan pendapatan keluarga (3,10), dan keterlibatan konservasi (3,17). Pengaruh signifikan perhutanan sosial ditemukan terhadap kesejahteraan ekonomi ($B = 0,877$; $\beta = 0,816$; $R^2 = 0,666$; $p < 0,001$) dan kualitas lingkungan ($B = 0,769$; $\beta = 0,814$; $R^2 = 0,663$; $p < 0,001$) dengan besaran yang hampir sama. Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap sumber daya alam serta kerentanan hutan rawa gambut terhadap kerusakan dan kebakaran diidentifikasi sebagai tantangan utama. Penguatan pelatihan, inovasi produk, dan rehabilitasi direkomendasikan.

Kata kunci: kesejahteraan ekonomi; kualitas lingkungan; lahan gambut; perhutanan sosial; regresi linear sederhana

PENDAHULUAN

Fungsi penyimpanan karbon, pengaturan tata air, dan penyediaan habitat bagi flora dan fauna dijalankan oleh lahan gambut, sedangkan kehidupan masyarakat di sekitarnya ditopang oleh ekosistem ini (Ramdhan, 2017; Triadi, 2020). Di Kalimantan Tengah, lahan gambut didegradasi oleh konversi hutan, drainase intensif, dan pembalakan liar (Surahman *et al*., 2018). Gambut terdegradasi sangat rentan terbakar dan kebakarannya sulit dikendalikan, sehingga fungsi ekohidrologi ditiadakan dan masalah sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada ekosistem ini ditambah (Carmenta *et al*., 2020). Luasan gambut yang signifikan ditemukan di Kecamatan Dusun Selatan, dan sekitar 11,70% di antaranya telah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, perkebunan, permukiman, dan pertambangan, sehingga kualitas lingkungan diturunkan dan sumber penghidupan masyarakat dikurangi (Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito, 2023).

Sebagai respons, program perhutanan sosial dikembangkan oleh pemerintah. Perhutanan sosial didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari pada kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama, dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Program ini dilandasi oleh tiga prinsip utama, yaitu hak (*right*), mata pencaharian (*livelihood*), dan konservasi (*conservation*) (Syahputra, 2019), dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat pada setiap tahap pengelolaan (Jabaruddin *et al*., 2023).

Dampak positif perhutanan sosial telah dilaporkan pada berbagai lokasi. Perubahan perilaku masyarakat dalam membuka lahan tanpa bakar, peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan kemitraan bisnis dilaporkan oleh Martapani *et al*. (2021) pada kelompok masyarakat peduli gambut, sedangkan respons positif masyarakat terhadap program ini dilaporkan oleh Zamrodah *et al*. (2024). Perhutanan sosial dipandang sebagai solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan oleh masyarakat sekitar hutan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka (Toha dan Nurhasanah, 2023). Namun, pengaruh perhutanan sosial terhadap kesejahteraan ekonomi dan kualitas lingkungan pada ekosistem gambut masih jarang diukur secara kuantitatif, khususnya di Kecamatan Dusun Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan untuk (1) mendeskripsikan pelaksanaan program perhutanan sosial, (2) mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasinya, serta (3) menganalisis pengaruh perhutanan sosial terhadap kesejahteraan ekonomi dan kualitas lingkungan masyarakat, termasuk perbandingan besaran kedua pengaruh tersebut.

BAHAN DAN METODE

Waktu, Tempat, dan Bahan

Penelitian dilaksanakan pada tiga areal perhutanan sosial di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, yaitu Hutan Desa Madara yang dikelola Lembaga Desa Pengelola Hutan (LDPH) Madara, Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sanggu Malawen di Desa Sanggu, dan HKm Juwung Bagantung di Desa Sababilah (Tabel 1). Kegiatan penyusunan kuesioner, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan dilaksanakan pada 1 Desember 2025 sampai 28 Februari 2026 (± 3 bulan).

Tabel 1. Karakteristik areal perhutanan sosial lokasi penelitian

Areal perhutanan sosial	Fungsi kawasan	Luas (ha)	Anggota (orang)
Hutan Desa LDPH Madara (Desa Madara)	Hutan Produksi Terbatas	± 802	33
HKm KTH Sanggu Malawen (Desa Sanggu)	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	± 641,50	95
HKm KTH Juwung Bagantung (Desa Sababilah)	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	± 119	30
Jumlah		**± 1.562,50**	**158**

Keterangan: LDPH = Lembaga Desa Pengelola Hutan; HKm = Hutan Kemasyarakatan; KTH = Kelompok Tani Hutan. Anggota Madara adalah pengurus dan penerima manfaat langsung (dari 160 kepala keluarga).

Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan kuesioner, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan literatur ilmiah. Pedoman wawancara, kuesioner, alat tulis, perekam suara, dan perangkat lunak SPSS digunakan sebagai alat penelitian.

Desain Penelitian dan Responden

Pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif deskriptif diterapkan melalui metode survei dan analisis inferensial. Responden ditentukan secara *purposive sampling* (Wardoyo *et al*., 2018) sebanyak 40% dari 158 anggota kelompok perhutanan sosial, yaitu 63 orang yang terdiri atas 3 pengurus kelompok dan 60 anggota masyarakat dengan gender, tingkat pendidikan, dan kelompok umur yang beragam. Informasi

kontekstual tambahan diperoleh dari 3 aparat desa dan 2 pendamping atau staf KPH.

Variabel dan Instrumen

Tiga variabel diamati, yaitu peran perhutanan sosial (X), kesejahteraan ekonomi (Y_1), dan kualitas lingkungan (Y_2). Variabel X diukur melalui 10 butir pada lima indikator (akses dan hak kelola, partisipasi pengambilan keputusan, pendampingan dan penyuluhan, penguatan kelembagaan, serta dukungan pemerintah dan mitra). Variabel Y_1 diukur melalui 8 butir pada empat indikator (pendapatan, mata pencaharian, peluang usaha, dan diversifikasi usaha), sedangkan variabel Y_2 diukur melalui 8 butir pada empat indikator (kualitas lahan, konservasi, pencegahan kebakaran, dan keberlanjutan). Seluruh butir dinilai menggunakan skala Likert lima tingkat (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju).

Analisis Data

Kualitas instrumen diuji melalui validitas butir (korelasi butir dengan skor total pada taraf 5%) dan reliabilitas (Cronbach's alpha; nilai ≥ 0,70 dinyatakan reliabel) (Shadiqi, 2023). Normalitas residual diuji dengan Kolmogorov-Smirnov (koreksi Lilliefors), dan linearitas hubungan diuji melalui *deviation from linearity*. Pengaruh perhutanan sosial terhadap kesejahteraan ekonomi dan kualitas lingkungan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana ($Y = a + bX + e$) pada SPSS. Koefisien regresi tidak terstandar (B), koefisien terstandar (β), nilai t, taraf signifikansi, selang kepercayaan 95% (*confidence interval*, CI), dan koefisien determinasi (R^2) dilaporkan. Hipotesis yang diuji adalah bahwa perhutanan sosial berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi (H_1) dan kualitas lingkungan (H_2) pada taraf 5%. Data kualitatif dari wawancara dan dokumen dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial

Pelaksanaan program pada ketiga areal diwujudkan melalui fasilitasi pengelolaan kawasan hutan berbasis resort; demplot budidaya hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti bawang dayak, vanili, pisang, dan pinang; serta sistem agrosilvopastura dan agrosilvofishery. Kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanfaatan atau pemungutan HHBK, pemanfaatan kawasan hutan, dan jasa lingkungan juga dilaksanakan. Pendampingan kelompok usaha dilakukan oleh UPT KPHL Gerbang Barito di Desa Madara serta UPT KPHP Barito Hilir di Desa Sanggu dan Desa Sababilah.

Persepsi responden terhadap ketiga variabel disajikan pada Tabel 2 sampai Tabel 4. Seluruh rerata butir berada pada kisaran 3,10 sampai 3,78, yaitu di atas titik tengah skala (3,00) tetapi masih di bawah nilai maksimum (5,00).

Tabel 2. Rerata persepsi responden terhadap peran perhutanan sosial (X; skala 1 sampai 5; n = 63)

Butir	Aspek yang dinilai	Rerata
7	Struktur organisasi kelompok berjalan baik	3,62
1	Akses legal pengelolaan lahan	3,56
2	Pembagian lahan adil dan transparan	3,56
4	Pendapat anggota dihargai	3,56
8	Transparansi administrasi dan keuangan	3,52
3	Keterlibatan dalam rapat perencanaan	3,51
10	Kemitraan usaha atau pengolahan produk	3,51
9	Dukungan pemerintah daerah pada pemasaran	3,41
6	Pendamping lapangan aktif membantu	3,35
5	Pelatihan berkala pengelolaan gambut	3,29

Keterangan: butir diurutkan menurut rerata tertinggi; nomor butir mengacu pada kuesioner.

Rerata tertinggi pada peran perhutanan sosial dicatat untuk struktur organisasi kelompok (3,62), diikuti akses legal, pembagian lahan, dan penghargaan terhadap pendapat anggota (masing-masing 3,56). Capaian ini dikaitkan dengan dukungan kelembagaan pemerintah berupa fasilitasi pengelolaan kawasan hutan berbasis resort. Resort dijadikan tempat belajar dan percontohan bagi masyarakat serta diposisikan sebagai perpanjangan tangan KPH di lapangan, sehingga sosialisasi program dan pencegahan kerusakan hutan dipercepat. Rerata terendah dicatat untuk pelatihan berkala (3,29). Sekolah lapang dan pelatihan teknis yang diselenggarakan pemerintah dengan demikian dinilai belum sesuai dengan harapan masyarakat, baik dari segi frekuensi maupun kualitas. Kolaborasi pelatihan dengan lembaga non pemerintah dan akademik disarankan oleh Rahman dan Ade (2024) agar persepsi dan pengetahuan masyarakat ditingkatkan.

Tabel 3. Rerata persepsi responden terhadap kesejahteraan ekonomi (Y_1; skala 1 sampai 5; n = 63)

Butir	Aspek yang dinilai	Rerata
17	Pengembangan usaha HHBK	3,56
15	Peluang usaha baru bagi masyarakat desa	3,48
18	Tambahan pendapatan dari HHBK	3,43
16	Kemudahan pemasaran produk melalui kelompok	3,32
14	Berkurangnya ketergantungan pada satu sumber pendapatan	3,19
12	Penghasilan tetap bagi keluarga	3,14
13	Kepemilikan lebih dari satu jenis usaha	3,14
11	Peningkatan pendapatan keluarga	3,10

Keterangan: HHBK = hasil hutan bukan kayu; butir diurutkan menurut rerata tertinggi.

Pada kesejahteraan ekonomi, rerata tertinggi dicatat untuk pengembangan usaha HHBK (3,56) dan peluang usaha baru (3,48). Usaha berbasis HHBK dan jasa lingkungan dikembangkan oleh masyarakat, antara lain produksi madu, bawang dayak, singkong, dan jagung, serta pengelolaan ekowisata. Salah satu usaha yang telah memperoleh akses pasar adalah bawang dayak, yang diolah menjadi tepung dan dijual kepada pihak swasta untuk dijadikan minuman kesehatan. Rerata terendah dicatat untuk peningkatan pendapatan keluarga (3,10). Manfaat ekonomi program ini dengan demikian telah dirasakan, tetapi peningkatan pendapatan rumah tangga secara keseluruhan belum optimal. Kondisi ini diduga disebabkan oleh tahap awal dan rendahnya inovasi pada sebagian usaha. Peningkatan pendapatan kelompok dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia dapat dicapai melalui inovasi usaha atau produk (Tampubolon *et al*., 2022).

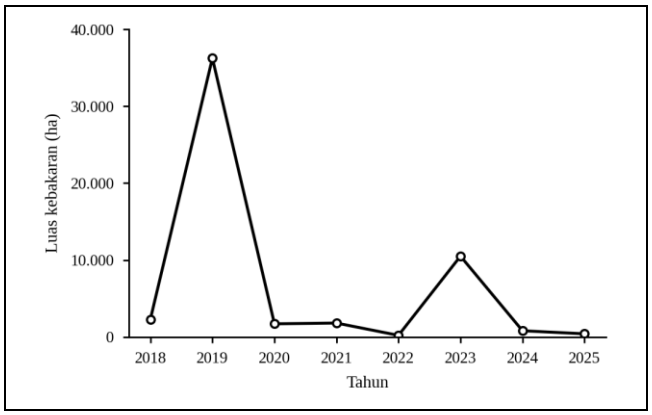
Tabel 4. Rerata persepsi responden terhadap kualitas lingkungan (Y_2; skala 1 sampai 5; n = 63)

Butir	Aspek yang dinilai	Rerata
23	Penurunan kebakaran lahan gambut dalam tiga tahun terakhir	3,78
26	Kesadaran menjaga fungsi ekologis gambut	3,70
22	Penerapan aturan pelestarian hutan	3,60
19	Kondisi gambut lebih terjaga	3,52
20	Berkurangnya kerusakan lingkungan	3,52
24	Patroli pencegahan kebakaran	3,49
25	Pemanfaatan hasil hutan secara lestari	3,43
21	Keterlibatan dalam konservasi (penanaman kembali)	3,17

Keterangan: butir diurutkan menurut rerata tertinggi.

Pada kualitas lingkungan, rerata tertinggi dicatat untuk penurunan kebakaran lahan gambut dalam tiga tahun terakhir (3,78) dan kesadaran menjaga fungsi ekologis gambut (3,70). Capaian ini sejalan dengan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang telah dilaksanakan, seperti pemantauan lingkungan, patroli pengamanan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan konservasi sumber daya alam. Edukasi serta contoh pengelolaan hutan lestari oleh resort dan KPH turut dipandang berkontribusi. Rerata terendah dicatat untuk keterlibatan dalam konservasi berupa penanaman kembali (3,17). Kegiatan rehabilitasi lahan dan ekosistem dengan demikian belum menjangkau masyarakat sebanyak kegiatan perlindungan hutan, dan kondisi ini dapat dikaitkan dengan proses rehabilitasi yang memerlukan waktu panjang sebelum hasilnya tampak nyata. Pendekatan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat diperlukan untuk memperbaiki kondisi sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat (Nurfatriani dan Alviya, 2019).

Persepsi penurunan kebakaran tersebut sejalan dengan data pemerintah (Gambar 1). Luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Selatan mencapai puncak pada 2019 (sekitar 36 ribu ha), menurun tajam pada 2020 sampai 2022, meningkat sementara pada 2023 (sekitar 10 ribu ha), dan kembali rendah pada 2024 dan 2025 (nilai pendekatan dari grafik sumber). Namun, penurunan sejak 2019 mendahului penerbitan persetujuan pengelolaan ketiga areal, yaitu pada 2023 untuk HKm Sanggu Malawen serta 2024 untuk Hutan Desa Madara dan HKm Juwung Bagantung, dan data tersebut mencakup seluruh kabupaten. Penurunan luas kebakaran tersebut dengan demikian tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan perhutanan sosial.



Gambar 1. Luas kebakaran hutan dan lahan (ha) di Kabupaten Barito Selatan tahun 2018 sampai 2025. Digambar ulang dari grafik SiPongi+ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2025); nilai merupakan pendekatan.

Bentuk dan Tantangan Perhutanan Sosial

Pendapatan masyarakat pada ketiga areal masih rendah karena ketergantungan terhadap alam masih tinggi, sumber mata pencaharian berkelanjutan masih terbatas, pengetahuan pengelolaan sumber daya masih kurang, dan aksesibilitas wilayah masih rendah sehingga hasil sumber daya alam sulit dipasarkan. Ketergantungan terhadap sumber daya alam dicatat pada sekitar 40% masyarakat Desa Sanggu dan sekitar 30% masyarakat Desa Sababilah, yang memanfaatkan danau, sungai, dan lahan untuk perikanan, pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lain. Tiga bentuk ketergantungan terhadap hutan ditemukan di lapangan, yaitu pemanfaatan kayu atau tegakan beserta getah, kulit buah, dan buahnya; pemanfaatan areal hutan sebagai areal budidaya; serta pemanfaatan fungsi ekonomi hutan untuk kebutuhan hidup, seperti perburuan, perikanan, dan air.

Peluang pengembangan juga diidentifikasi, yaitu (1) potensi unggulan berupa jasa lingkungan (perdagangan karbon dan ekowisata), produk lokal spesifik (madu hutan, rotan, perikanan, dan jamur), serta tanaman obat; (2) keterampilan turun-temurun masyarakat dalam membuat kerajinan anyaman rotan dan bambu, yang saat ini hanya dibuat berdasarkan pesanan karena strategi pemasaran yang tepat belum tersedia; serta (3) dukungan para pihak (organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga nirlaba) berupa pemberdayaan masyarakat dan peluang pendanaan.

Pada aspek lingkungan, ekosistem hutan gambut sangat rentan rusak, dan kerusakan yang telah terjadi sulit dipulihkan. Sebagian besar areal perhutanan sosial berupa kawasan gambut yang mudah terbakar pada musim kemarau akibat pengeringan, dan kondisi ini diperparah oleh kanal yang dibangun pada proyek lahan gambut satu juta hektare. Kesadaran masyarakat untuk membuka lahan tanpa pembakaran juga belum tinggi. Selain itu, batas desa dan batas kawasan hutan belum dipahami dengan baik, sebab istilah kawasan hutan oleh sebagian besar masyarakat hanya dipahami sebatas pengertian hutan. Pengelolaan yang didampingi dan mengutamakan kearifan lokal diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan (Gunawan dan Dian, 2019).

Pengaruh Perhutanan Sosial terhadap Kesejahteraan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan

Asumsi normalitas residual (Kolmogorov-Smirnov; p = 0,200 untuk kedua model) dan linearitas hubungan (*deviation from linearity*; p = 0,659 untuk kesejahteraan ekonomi dan p = 0,200 untuk kualitas lingkungan) terpenuhi. Hasil regresi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil regresi linear sederhana pengaruh perhutanan sosial (X) terhadap kesejahteraan ekonomi (Y_1) dan kualitas lingkungan (Y_2) (n = 63)

Parameter	Kesejahteraan ekonomi (Y_1)	Kualitas lingkungan (Y_2)
Konstanta (a)	-4,664	0,838
Koefisien regresi (B)	0,877	0,769
Galat baku B	0,080	0,070
β terstandar	0,816	0,814
Nilai t	11,020	10,944
Signifikansi (p)	< 0,001	< 0,001
CI 95% batas bawah	0,718	0,629
CI 95% batas atas	1,037	0,910
R^2	0,666	0,663
R^2 terkoreksi	0,660	0,657

Keterangan: B = koefisien regresi tidak terstandar; β = koefisien regresi terstandar; CI = selang kepercayaan. Konstanta tidak signifikan (p = 0,112 untuk Y_1; p = 0,744 untuk Y_2).

Perhutanan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi (B = 0,877; β = 0,816; t = 11,020; p < 0,001), sehingga H_1 diterima. Setiap peningkatan satu satuan skor peran perhutanan sosial diikuti peningkatan skor kesejahteraan ekonomi sebesar 0,877. CI 95% (0,718 sampai 1,037) tidak melewati nol, dan 66,6% variasi kesejahteraan ekonomi dijelaskan oleh perhutanan sosial (R^2 = 0,666), sedangkan 33,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti modal usaha dan peralatan pendukung usaha.

Pengaruh ini dikaitkan dengan keterlibatan aktif pemerintah sebagai pendamping, yaitu UPT KPHL Gerbang Barito di Desa Madara serta UPT KPHP Barito Hilir di Desa Sanggu dan Desa Sababilah, dalam memberikan pelatihan dan pendampingan serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemerintah. Demplot HHBK (bawang dayak, madu kelulut, pisang, pinang, vanili, jagung, singkong, kelapa, perikanan, dan peternakan) dibangun melalui kegiatan tersebut, dan upah pembersihan lahan, penanaman, serta pemeliharaan diperoleh masyarakat. Hasil pelatihan telah diterapkan oleh sebagian anggota kelompok, misalnya pada budidaya bawang dayak dan lebah madu kelulut. Peran penghubung antara produk masyarakat dan pembeli pihak ketiga dijalankan oleh pemerintah, sehingga hasil budidaya bawang dayak masyarakat Desa Madara dibeli oleh pihak ketiga dan menjadi salah satu sumber pendapatan. Respons positif masyarakat dan dampak baik program pada kehidupan masyarakat sekitar hutan juga dilaporkan oleh Zamrodah *et al*. (2024).

Potensi ekowisata dan jasa lingkungan, antara lain Danau Sanggu, pemandian air merah, wisata susur sungai, dan Sungai Rawen, kurang dimanfaatkan sebelum perhutanan sosial dibentuk, dan kini dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan juga dikaitkan oleh responden dengan meningkatnya produksi lahan dan kebun setelah hak kelola dan areal kerja yang pasti diperoleh. Sebelum hak pengelolaan diberikan, hutan hanya dikelola sebagai sumber pendapatan sampingan, tetapi setelahnya hasil kebun dan lahan dijadikan sumber pendapatan utama. Kepastian pasar juga menjamin produk masyarakat terjual, sebab hasil hutan yang dipanen dapat dinikmati secara langsung apabila pasar tersedia (Aletrino *et al*., 2021).

Perhutanan sosial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas lingkungan (B = 0,769; β = 0,814; t = 10,944; p < 0,001), sehingga H_2

diterima. Setiap peningkatan satu satuan skor peran perhutanan sosial diikuti peningkatan skor kualitas lingkungan sebesar 0,769 (CI 95% 0,629 sampai 0,910). Sebesar 66,3% variasi kualitas lingkungan dijelaskan oleh perhutanan sosial (R^2 = 0,663), sedangkan 33,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti sarana dan prasarana yang tersedia.

Setelah surat keputusan hak pengelolaan hutan secara legal diterbitkan, masyarakat dilaporkan menjadi lebih aktif dan produktif dalam mengelola hutan, misalnya melalui penanaman dan perawatan tanaman, karena akses dan kepastian areal kerja diperoleh sehingga pengelolaan hutan secara ilegal tidak dilakukan lagi. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan dan perhutanan sosial juga ditingkatkan melalui berbagai pertemuan dan penyuluhan oleh pihak pemerintah dan swasta. Akses kelola hutan dan lahan yang setara dimungkinkan oleh perhutanan sosial (Mahardika dan Muyani, 2021), dan fungsi serta tujuan hutan kemasyarakatan dipahami petani melalui program ini, termasuk tanggung jawab menjaga kelestariannya (Martapani *et al*., 2021). Menurut masyarakat, pembukaan lahan, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir telah berkurang sejak program dijalankan.

Pengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi (B = 0,877) secara numerik sedikit lebih besar daripada pengaruh terhadap kualitas lingkungan (B = 0,769). Namun, selisih tersebut sangat kecil, sebab koefisien terstandar (0,816 dan 0,814) serta koefisien determinasi (0,666 dan 0,663) hampir sama, dan CI 95% kedua koefisien saling tumpang tindih. Selisih ini tidak diuji secara statistik sehingga dominansi salah satu pengaruh tidak dapat dinyatakan.

Hasil tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati. Data dikumpulkan pada satu waktu dari responden yang sama untuk ketiga variabel, tanpa kelompok pembanding di luar perhutanan sosial, dan persepsi responden dijadikan dasar pengukuran. Pengaruh yang diperoleh karena itu mencerminkan asosiasi persepsi, dan simpulan kausal belum dapat ditarik. Persetujuan pengelolaan yang baru diterbitkan pada 2023 dan 2024 juga menyebabkan dampak jangka panjang, terutama pada kualitas lingkungan, belum dapat dinilai. Penelitian lanjutan dengan desain longitudinal, kelompok pembanding, dan regresi berganda disarankan.

KESIMPULAN

1. Program perhutanan sosial di Kecamatan Dusun Selatan dilaksanakan melalui fasilitasi pengelolaan kawasan hutan berbasis resort, demplot budidaya HHBK, konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanfaatan HHBK dan kawasan hutan, serta jasa lingkungan. Seluruh rerata butir persepsi berada di atas titik tengah skala (3,10 sampai 3,78), dengan pelatihan (3,29), peningkatan pendapatan keluarga (3,10), dan keterlibatan konservasi (3,17) sebagai butir terendah pada masing-masing variabel.
2. Tantangan utama berupa tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam pada aspek ekonomi, serta kerentanan ekosistem hutan rawa gambut terhadap kerusakan dan kebakaran dan terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang batas desa dan batas kawasan hutan pada aspek lingkungan.
3. Perhutanan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi (B = 0,877; β = 0,816; R^2 = 0,666; $p < 0,001$) dan kualitas lingkungan (B = 0,769; β = 0,814; R^2 = 0,663; $p < 0,001$). Besaran kedua pengaruh hampir sama, dan pengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi hanya sedikit lebih besar secara numerik.
4. Penguatan pelatihan teknis melalui kolaborasi dengan lembaga non pemerintah dan akademik, peningkatan inovasi dan kreativitas usaha (diversifikasi produk, kemasan, dan pemasaran digital), serta penguatan kegiatan rehabilitasi direkomendasikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para narasumber, yaitu UPT KPHL Gerbang Barito, UPT KPHP Barito Hilir, dan masyarakat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Desa Madara, Desa Sanggu, dan Desa Sababilah yang bersedia diwawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

Aletrino, L., Mahdi dan Rina, S. (2021) ‘Dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman’, *Joseta*, 3(1).

Carmenta, R., Zabala, A., Trihadmojo, B., Gaveau, D., Salim, M. dan Phelps, J. (2020) ‘Evaluating bundles of interventions to prevent peat-fires in Indonesia’, *Global Environmental Change*, 102154.

Gunawan, H. dan Dian, A. (2019) ‘Potensi perhutanan sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam restorasi gambut’, *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 13.

Jabaruddin, Sabri, G., Karmila, Sofyan, R., Agus, A., Jaya, S.L., Syaiful, A., Harlita, Hasjad, Elma dan Putra, K.R. (2023) ‘Perlindungan hukum pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) dalam peningkatan pendapatan masyarakat desa

sekitar hutan desa', *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2025) *SiPongi+: data luas kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Barito Selatan*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mahardika, A. dan Muyani, H.S. (2021) 'Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan', *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), hal. 10-18.

Martapani, A.N., Hamdani, F. dan Muhammad, N. (2021) 'Dampak hutan kemasyarakatan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat studi kasus: masyarakat peduli gambut Sukamaju KPH Kayu Tangi', *Jurnal Rimba Lestari*, 1(1), hal. 35-46.

Nurfatriani, F. dan Alviya, I. (2019) 'Efektivitas kebijakan alokasi lahan 12,7 juta ha untuk perhutanan sosial: studi kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(1), hal. 47-66.

Rahman, F. dan Ade, I. (2024) 'Menelisik hutan desa (pengelolaan hutan berbasis masyarakat)', *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*.

Ramdhan, M. (2017) 'Analisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan restorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah', *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Shadiqi, M.A. (2023) *Statistik untuk penelitian psikologi dengan SPSS*. Depok: Rajawali Pers.

Surahman, A., Soni, P. dan Shivakoti, G.P. (2018) 'Reducing CO2 emissions and supporting food security in Central Kalimantan, Indonesia, with improved peatland management', *Land Use Policy*, 72, hal. 325-332.

Syahputra, O.H. (2019) 'Alternatif pengelolaan sumberdaya hutan melalui perhutanan sosial', *Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).

Tampubolon, R., Fikarwin, Z. dan Agus, P. (2022) 'Strategi pendampingan dalam pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi', *Serambi Engineering*, 7(1).

Toha, A.W. dan Nurhasanah (2023) 'Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di Kota Tarakan', *Ulin: Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), hal. 17-25.

Triadi, B.L. (2020) 'Water management for agriculture development in peatlands', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 437(1).

Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito Unit IX (2023) *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Tahun 2023*. Buntok: UPT KPHL Gerbang Barito.

Wardoyo, Yuningsih, L. dan Rahmat, K. (2018) 'Partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran lahan gambut di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan', *Sylva*, 6(1), hal. 14-22.

Zamrodah, Y., Luhur, A.P. dan Dwi, A.F.A. (2024) 'Analisis persepsi masyarakat sekitar hutan produksi tetap terhadap program perhutanan sosial (studi kasus LMDH Jati Jaya Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)', *Journal Viabel Pertanian*, 18(2), hal. 88-98.